



**PUTUSAN**

Nomor 770/Pdt.G/2020/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Makkoring, 07 April 1990, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan terakhir SD, Alamat Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, SH, MH. Advokat / Pengacara Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai surat kuasa tanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 348/SK/AD/XII/2020/PA.Sidrap tertanggal 3 Desember 2020 selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Makkoring, 13 Juni 1991, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Alamat Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 3 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 771/Pdt.G/2020/PA. Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 4 Put. No. 771/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 Mei 2014 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0109 / 015 / V / 2014 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap tertanggal 12 Mei 2014.
2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat belum dikarunia seorang anak.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan Tergugat secara bergantian tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa pada saat tinggal bersama di kediaman orang tua penggugat, Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 dan di sebabkan :
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
  - Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi tidak di hiraukan.
6. Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sejak bulan Desember 2015 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 4 Put. No.771/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 771/Pdt.G/2020/PA. Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4 Put. No. 771/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail, S.H.I dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

ttd

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Ibrahim Thoai, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 246.000,00</b>

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 771/Pdt.G/2020/PA. Sidrap